SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu menyusun jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

(1) Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdiri atas:
   a. jabatan pimpinan tinggi;
   b. jabatan administrasi; dan
   c. jabatan fungsional.

(2) Jenjang jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Jenjang jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.

(4) Kategori jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. jabatan fungsional keterampilan.

(5) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan/atau
d. ahli pertama.

(6) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir/pelaksana lanjutan;
c. terampil/pelaksana; dan/atau
d. pemula.

Pasal 2

(1) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
(3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1717), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. Lampiran I Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1340); dan

b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1717);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Hariyadi Wibowo

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN
1.	Kepala
2.	Sekretaris Utama
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
4.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
6.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
7.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
8.	Inspektur Utama
9.	Kepala Biro Perencanaan
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
12.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
13.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
14.	Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
15.	Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
16.	Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
17.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan
18.	Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana
19.	Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
20.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi
21.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus

NO	NAMA JABATAN
22.	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
23.	Direktur Bina Ketahanan Remaja
24.	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
25.	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
26.	Direktur Teknologi Informasi dan Data
27.	Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
28.	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
29.	Direktur Pelaporan dan Statistik
30.	Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
32.	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
33.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
34.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
35.	Inspektur Wilayah I
36.	Inspektur Wilayah II
37.	Inspektur Wilayah III
38.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
39.	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi
40.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol
41.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama
42.	Kepala Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana
43.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
44.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

NO	NAMA JABATAN
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Harjadi Wibowo

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN
1.	Analis Advokasi Hukum
2.	Analis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
3.	Analis Alat Reproduksi
4.	Analis Barang Milik Negara
5.	Analis Data dan Informasi
6.	Analis Diklat
7.	Analis Hasil Penelitian
8.	Analis Hubungan Antar Lembaga
9.	Analis Humas
10.	Analis Keluarga Berencana
11.	Analis Kerjasama Diklat
12.	Analis Kesehatan
13.	Analis Kesehatan Ibu dan Anak
14.	Analis Ketahanan Keluarga
15.	Analis Keuangan
16.	Analis Kinerja

NO	NAMA JABATAN
17.	Analis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
18.	Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
19.	Analis Mutasi Pejabat Negara
20.	Analis Organisasi
21.	Analis Penelitian dan Pengembangan
22.	Analis Pengawasan
23.	Analis Perencanaan
24.	Analis Perencanaan Anggaran
25.	Analis Protokol
26.	Analis Sarana Program Keluarga Berencana
27.	Analis Statistik
28.	Analis Tata Laksana
29.	Analis Tata Usaha
30.	Analis Administrasi Pengawasan
31.	Analis Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia
32.	Analis Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur dan Sasaran Khusus
33.	Analis Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta
34.	Analis Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
35.	Analis Bina Ketahanan Keluarga
36.	Analis Bina Ketahanan Remaja
37.	Analis Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
38.	Analis Hukum
39.	Analis Kepegawaian dan Hukum
40.	Analis Kerjasama

NO	NAMA JABATAN
41.	Analis Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
42.	Analis Kerjasama Pendidikan Kependudukan
43.	Analis Kesehatan Reproduksi Keluarga Sejahtera
44.	Analis Keuangan dan Barang Milik Negara
45.	Analis Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
46.	Analis Laporan Hasil Pemeriksaan
47.	Analis Manajemen Kinerja
48.	Analis Mekanisme Operasional Lini Lapangan
49.	Analis Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
50.	Analis Pelatihan dan Pengembangan
51.	Analis Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
52.	Analis Penetapan Parameter Kependudukan
53.	Analis Pengelolaan BMN
54.	Analis Pengendalian Penduduk
55.	Analis Penggerakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
56.	Analis Pelaporan dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
57.	Analis Penyelenggara dan Evaluasi
58.	Analis Peraturan Perundang-Undangan
59.	Analis Program Pendidikan dan Pelatihan
60.	Analis Umum
61.	Analis Umum dan Humas
62.	Analis Hubungan Kelembagaan
63.	Analis Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota
64.	Analis Organisasi dan Tata Laksana
65.	Analis Promosi

NO	NAMA JABATAN
66.	Analis Sarana Produksi Media Komunikasi
67.	Analis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
68.	Analis Pengolahan Data
69.	Analis Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
70.	Analis Pengembangan Infrastruktur TI
71.	Analis Teknologi Informasi
72.	Analis Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
73.	Analis Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
74.	Analis Kelangsungan Hidup Ibu
75.	Analis Penanggulangan Infertilitas
76.	Analis Pencegahan HIV dan AIDS
77.	Analis Pencegahan Kanker Alat Reproduksi
78.	Analis Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Swasta
79.	Analis Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
80.	Analis Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
81.	Analis Penyediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
82.	Analis Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak
83.	Analis Pengembangan Program Bina Keluarga Anak
84.	Analis Pengembangan Program Bina Keluarga Balita
85.	Analis Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
86.	Analis Monitoring Bina Keluarga Lansia dan Rentan
87.	Analis Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat
88.	Analis Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
89.	Analis Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat

NO	NAMA JABATAN
90.	Analis Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
91.	Analis Penyelenggaraan dan Evaluasi
92.	Analis Pemanfaatan Hasil Penelitian
93.	Analis Evaluasi dan Pelaporan
94.	Analis Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
95.	Analis Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
96.	Analis Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal
97.	Analis Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
98.	Analis Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
99.	Analis Penetapan Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk
100.	Analis Administrasi Umum
101.	Analis Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
102.	Analis Pembakuan dan Sarana Kerja
103.	Analis Evaluasi Kinerja
104.	Analis Rumah Tangga
105.	Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana
106.	Analis Administrasi Jabatan Fungsional
107.	Analis Bidang Pengawasan
108.	Analis Dampak Kependudukan
109.	Analis Kesehatan Reproduksi
110.	Analis Kompetensi Pegawai
111.	Analis Mutasi Jabatan Pegawai
112.	Analis Penyuluh Keluarga Berencana
113.	Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

NO	NAMA JABATAN
114.	Analis Program dan Kerjasama
115.	Analis Tata Operasional
116.	Analis Hubungan Media Masa
117.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
118.	Analis Program/Perencanaan
119.	Analis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
120.	Analis Pemeliharaan Peralatan
121.	Analis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
122.	Analis SDM Aparatur
123.	Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
124.	Analis Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
125.	Analis Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak
126.	Analis Kesejahteraan Keluarga
127.	Analis Kesejahteraan Rakyat
128.	Analis Evaluasi Progam Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
129.	Analis Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
130.	Analis Konten Media Sosial
131.	Analis Dokumentasi dan Perpustakaan
132.	Analis Perencanaan dan Pemasaran
133.	Analis Program Kerjasama Luar Negeri
134.	Analis Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
135.	Analis Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
136.	Analis Manajemen Perkantoran
137.	Analis Institusi Masyarakat Pedesaan
138.	Analis Penyusunan Parameter Kependudukan
139.	Analis Ketahanan Ekonomi

NO	NAMA JABATAN
140.	Analis Pembinaan Keluarga Berencana
141.	Analis Kinerja Pegawai
142.	Analis Advokasi, Penggerakan dan Informasi
143.	Analis Perencanaan Program dan Anggaran
144.	Verifikator Anggaran
145.	Verifikator Keuangan
146.	Bendahara
147.	Bendahara Pengeluaran
148.	Bendahara Pengeluaran Pembantu
149.	Pembantu Bendahara
150.	Pemelihara Bangunan
151.	Pemelihara Kendaraan
152.	Pemelihara Sarana dan Prasarana
153.	Pemelihara Arsip
154.	Pemelihara Bahan Kesehatan Reproduksi
155.	Pemelihara Barang Inventaris Kantor
156.	Pemelihara Barang Operasional Diklat
157.	Pemelihara Barang Umum dan Humas
158.	Pemelihara Peralatan Kantor
159.	Pemelihara Persuratan
160.	Pemelihara Umum
161.	Pemelihara Dokumen Perpustakaan
162.	Pemelihara Dokumen Bina KB Klinik
163.	Pemelihara Dokumen Monitoring dan Evaluasi
164.	Pemelihara Sarana Pelayanan KB
165.	Pemelihara Bahan Promosi

NO	NAMA JABATAN
166.	Pemelihara Dokumen Hubungan Antar Lembaga
167.	Pemelihara Bahan Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Lansia
168.	Pemelihara Data Monitoring dan Evaluasi
169.	Pemelihara Data Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
170.	Pemelihara Data Pengembangan Permodalan dan Kemitraan
171.	Pemelihara Bahan Perencanaan dan Pemasaran
172.	Pemelihara Dokumen Pendidikan dan Pelatihan
173.	Pemelihara Dokumen Hasil Penelitian
174.	Pemelihara Dokumen Analisis Politik
175.	Pemelihara Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal
176.	Pemelihara Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal
177.	Pemelihara Dokumen Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
178.	Pengadministrasi Bahan Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
179.	Pemelihara Data Profil dan Proyeksi Pengendalian Penduduk
180.	Pemelihara Dokumen Hukum dan Perundang-Undangan
181.	Pemelihara Dokumen Organisasi
182.	Pemelihara Dokumen Perencanaan Kinerja
183.	Pemelihara Dokumen Protokol
184.	Pemelihara Dokumen Tata Usaha
185.	Pemelihara Instalasi Air
186.	Pemelihara Instalasi Listrik
187.	Pemelihara Arsip Kepegawaian
188.	Pemelihara Dokumen Administrasi Pengawasan

NO	NAMA JABATAN
189.	Pemelihara Dokumen Program Pendidikan dan Pelatihan
190.	Pemelihara Administrasi Gudang dan Alat Kontrasepsi
191.	Pemelihara Umum dan Humas
192.	Pemelihara Dokumen Peralatan Advokasi
193.	Pemeriksa Kependudukan
194.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana
195.	Pengadministasi Umum
196.	Pengadministrasi Keuangan
197.	Pengadministrasi Persuratan
198.	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi
199.	Pengadministrasi Bahan
200.	Pengadministrasi Bahan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
201.	Pengadministrasi Bahan Keluarga Berencana Jalur Swasta
202.	Pengadministrasi Bahan Kesehatan Reproduksi
203.	Pengadministrasi Bahan Keuangan
204.	Pengadministrasi Bahan Penetapan Parameter Kependudukan
205.	Pengadministrasi Bahan Penyelenggaraan dan Evaluasi
206.	Pengadministrasi Bahan Umum
207.	Pengadministrasi Bahan Umum, Humas dan Persuratan
208.	Pengadministrasi Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
209.	Pengadministrasi Bina Ketahanan Remaja
210.	Pengadministrasi Data dan Informasi
211.	Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
212.	Pengadministrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
213.	Pengadministrasi Tata Operasional

NO	NAMA JABATAN
214.	Pengadministrasi Umum dan Humas
215.	Pengadministrasi Pengumpulan Data
216.	Pengadministrasi Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Pemerintah
217.	Pengadministrasi Bahan Bina Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia
218.	Pengadministrasi Monitoring dan Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal
219.	Pengadministrasi Bahan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Wilayah galcitas
220.	Pengadministrasi Bahan Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
221.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama
222.	Pengadministrasi Bahan Kepegawaian dan Hukum
223.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak
224.	Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai
225.	Pengadministrasi Kependudukan
226.	Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan
227.	Pengawas Kependudukan
228.	Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana
229.	Pengevaluasi Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
230.	Pengevaluasi Persuratan
231.	Pengevaluasi Keuangan dan BMN
232.	Penginventarisasi
233.	Penginventaris Umum dan Humas
234.	Pengelola Barang Milik Negara
235.	Pengelola Kepegawaian
236.	Pengelola Rumah Tangga

NO	NAMA JABATAN
237.	Pengelola Barang Inventaris
238.	Pengelola Barang Persediaan
239.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
240.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
241.	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat
242.	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
243.	Pengelola Mutasi Penduduk
244.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana
245.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga
246.	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
247.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana
248.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
249.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
250.	Penyusun Kerjasama Pendidikan Kependudukan
251.	Penyusun Bahan Advokasi Bahan Komunikasi Informasi Edukasi
252.	Penyusun Bahan Analisis Dampak Kependudukan
253.	Penyusun Bahan Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia
254.	Penyusun Bahan Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Lanjut Usia
255.	Penyusun Bahan Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Lansia
256.	Penyusun Bahan Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta
257.	Penyusun Bahan Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
258.	Penyusun Bahan Bina Ketahanan Remaja

NO	NAMA JABATAN
259.	Penyusun Bahan Data dan Informasi
260.	Penyusun Bahan Evaluasi Kinerja
261.	Penyusun Bahan Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
262.	Penyusun Bahan Kepegawaian dan Hukum
263.	Penyusun Bahan Kerjasama Pendidikan Kependudukan
264.	Penyusun Bahan Kesehatan Reproduksi
265.	Penyusun Bahan Kesehatan Reproduksi Keluarga Sejahtera
266.	Penyusun Bahan Keuangan dan BMN
267.	Penyusun Bahan Keuangan dan Pengelolaan BMN
268.	Penyusun Bahan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
269.	Penyusun Bahan Penetapan Parameter Kependuduk
270.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan dan Evaluasi
271.	Penyusun Bahan Perencanaan
272.	Penyusun Bahan Program dan Kerjasama
273.	Penyusun Bahan SAI, Keuangan dan RAKL
274.	Penyusun Bahan Sarana Program Keluarga Berencana
275.	Penyusun Bahan Tata Operasional
276.	Penyusun Bahan Umum dan Humas
277.	Penyusun Bahan Evaluasi Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
278.	Penyusun Bahan Informasi dan Peningkatan Teknologi Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
279.	Penyusun Bahan Pengembangan Permodalan dan Kemitraan Usaha Ekonomi Keluarga
280.	Penyusun Bahan Tata Usaha
281.	Penyusun Program
282.	Penyusun Bahan Penyusunan Program

NO	NAMA JABATAN
283.	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
284.	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pendidikan Kependudukan
285.	Penyusun Bahan Data Perencanaan
286.	Penyusun Bahan Perencanaan Program dan Anggaran
287.	Penyusun Bahan Pemeliharaan Kendaraan
288.	Penyusun Bahan Persuratan
289.	Penyusun Bahan Protokol
290.	Penyusun Bahan Rumah Tangga
291.	Penyusun Bahan Tata Usaha Pimpinan
292.	Penyusun Bahan Kompetensi Pegawai
293.	Penyusun Bahan Data Monitoring dan Evaluasi PKB/PLKB
294.	Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
295.	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan
296.	Penyusun Bahan Pengembangan Infrasruktur TI
297.	Penyusun Bahan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
298.	Penyusun Bahan Pencegahan Penyakit Menular Seks
299.	Penyusun Bahan Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak
300.	Penyusun Bahan Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
301.	Penyusun Bahan Administrasi Umum
302.	Penyusun Bahan Perbendaharaan
303.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum
304.	Penyusun Bahan Kesejahteraan Pegawai
305.	Penyusun Bahan Pengembangan Karir Pegawai
306.	Penyusun Analis Dampak Kependudukan
307.	Penyusun Bahan Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit
308.	Penyusun Bahan Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Pemerintah
309.	Penyusun Bahan Bina Pengembangan dan Seleksi Produk

NO	NAMA JABATAN
310.	Penyusun Bahan Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
311.	Penyusun Bahan Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perbatasan
312.	Penyusun Bahan Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal Terpencil dan Perbatasan
313.	Penyusun Bahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
314.	Penyusun Bahan Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
315.	Penyusun Bahan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
316.	Penyusun Bahan Bina Ketahanan Keluarga
317.	Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
318.	Penyusun Bahan Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta
319.	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga
320.	Penyusun Bahan Pengembangan Situs BKKBN dan Media Konferensi
321.	Penyusun Bahan Barang Milik Negara
322.	Penyusun Bahan Administrasi Pengawasan
323.	Penyusun Bahan Advokasi
324.	Penyusun Bahan Parameter Kependudukan
325.	Penyusun Bahan Pengendalian Penduduk
326.	Penyusun Bahan Penyusunan Parameter Kependudukan
327.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga
328.	Penyusun Bahan Mekasinsme Operasional Keluarga Berencana
329.	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana
330.	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
331.	Penyusun Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
332.	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
333.	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
334.	Penyusun Sarana Program Keluarga Berencana

NO	NAMA JABATAN
335.	Penata Laporan Keuangan
336.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
337.	Petugas Keamanan
338.	Pramu Bakti/Pesuruh
339.	Sekretaris
340.	Pengemudi

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Hariyadi Wibowo

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN
1.	Analis Anggaran Ahli Madya
2.	Analis Anggaran Ahli Muda
3.	Analis Anggaran Ahli Pertama
4.	Analis Hukum Ahli Madya
5.	Analis Hukum Ahli Muda
6.	Analis Hukum Ahli Pertama
7.	Analis Kebijakan Ahli Utama
8.	Analis Kebijakan Ahli Madya
9.	Analis Kebijakan Ahli Muda
10.	Analis Kebijakan Ahli Pertama
11.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
12.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
13.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
14.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia
15.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir/Pelaksana Lanjutan
16.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil/Pelaksana
17.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
18.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
19.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama

NO	NAMA JABATAN
20.	Pranata Keuangan APBN Penyelia
21.	Pranata Keuangan APBN Mahir/Pelaksana Lanjutan
22.	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana
23.	Arsiparis Ahli Utama
24.	Arsiparis Ahli Madya
25.	Arsiparis Ahli Muda
26.	Arsiparis Ahli Pertama
27.	Arsiparis Penyelia
28.	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan
29.	Arsiparis Terampil/Pelaksana
30.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama
31.	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya
32.	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda
33.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
34.	Auditor Ahli Utama
35.	Auditor Ahli Madya
36.	Auditor Ahli Muda
37.	Auditor Ahli Pertama
38.	Auditor Penyelia
39.	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan
40.	Auditor Terampil/Pelaksana
41.	Penata Ruang Ahli Madya
42.	Penata Ruang Ahli Muda
43.	Penata Ruang Ahli Pertama
44.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
45.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
46.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
47.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama
48.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya
49.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
50.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
51.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama
52.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
53.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

NO	NAMA JABATAN
54.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
55.	Perencana Ahli Utama
56.	Perencana Ahli Madya
57.	Perencana Ahli Muda
58.	Perencana Ahli Pertama
59.	Penyuluh KB Ahli Utama
60.	Penyuluh KB Ahli Madya
61.	Penyuluh KB Ahli Muda
62.	Penyuluh KB Ahli Pertama
63.	Penyuluh KB Penyelia
64.	Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan
65.	Penyuluh KB Terampil/Pelaksana
66.	Penyuluh KB Pemula
67.	Pranata Humas Ahli Madya
68.	Pranata Humas Ahli Muda
69.	Pranata Humas Ahli Pertama
70.	Pranata Humas Penyelia
71.	Pranata Humas Mahir/Pelaksana Lanjutan
72.	Pranata Humas Terampil/Pelaksana
73.	Pranata Komputer Ahli Utama
74.	Pranata Komputer Ahli Madya
75.	Pranata Komputer Ahli Muda
76.	Pranata Komputer Ahli Pertama
77.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan
78.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana
79.	Pranata Komputer Pemula
80.	Pustakawan Ahli Utama
81.	Pustakawan Ahli Madya
82.	Pustakawan Ahli Muda
83.	Pustakawan Ahli Pertama
84.	Pustakawan Penyelia
85.	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan
86.	Pustakawan Terampil/Pelaksana
87.	Statistisi Ahli Utama

NO	NAMA JABATAN
88.	Statistisi Ahli Madya
89.	Statistisi Ahli Muda
90.	Statistisi Ahli Pertama
91.	Widyaiswara Ahli Utama
92.	Widyaiswara Ahli Madya
93.	Widyaiswara Ahli Muda
94.	Widyaiswara Ahli Pertama
95.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama
96.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya
97.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
98.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Hariyadi Wibowo